

IMPLEMENTASI POLITIK PENDIDIKAN DALAM KURIKULUM 2013

Jumani

STKIP PGRI Trenggalek

Email: Jumanijujuk@gmail.com

Jl. Supriyadi 22 KP.66319 Trenggalek

Abstrak: Politik pendidikan adalah sikap yang konsisten dalam mengarahkan kontrol sosial, baik tujuan dan metodenya terhadap sistem pendidikan, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan berdasarkan teori dan realitas di lapangan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila. Tujuan politik pendidikan adalah untuk mengetahui dan menyamakan standarisasi kualitas pendidikan nasional di seluruh Indonesia. Guna mewujudkan hal itu, sangat diperlukan kurikulum 2013 yang mengedepankan kompetensi personal melalui proses pengamatan, menanya, analisis, dan mencoba, sehingga diperoleh peserta didik yang terlatih dalam memecahkan persoalan. Kurikulum 2013 dengan standar penilaian proses pengerjaannya tidak sekedar hasilnya, penilaian ekspresif yang terkandung dalam rumusan merupakan kelanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), baik kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu (soft skills dan hard skills seimbang dan integratif).

Kata Kunci: implementasi, politik pendidikan, Kurikulum 2013

Abstract: Political education is a consistent attitude in directing social control, both the purpose and methods of the education system, such as developing skills and character development and civilization dignified nation in the context of the intellectual life of the nation, the development of students' potentials to become a man of faith and fear of Allah, noble, healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens democratic and accountable. An overall education policy formulation process and the results of strategic measures of education based on theory and reality in the field that are derived from the vision, the mission of education in order to realize the achievement of educational goals based on moral values of Pancasila. Political goal of education is to know and equate national standardization of the quality of education in Indonesia. In order to achieve this, curriculum 2013 is needed to emphasizes personal competence through a process of observation, asking, analysis, and trying, in order to obtain learners are trained in solving problems. Curriculum assessment standards in 2013 with the workmanship is not just the result, expressive assessment contained in the formulation is a continuation of the development of Competency Based Curriculum (CBC), both competence attitudes, knowledge, and skills in an integrated manner (soft skills and hard skills balanced and integrative).

Keywords: implementation, political education, Curriculum 2013

PENDAHULUAN

Hakikatnya, pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan sebagai proses

dan upaya untuk manusia berdaya guna dalam rangka menciptakan generasi yang bermanfaat dan bermartabat. Cita-cita

mulia sebagaimana di atas pada prakteknya lembaga pendidikan menemui sejumlah tantangan yang wajib diperhatikan. Hal ini tidak lepas dari bagaimana sinergi dan strategi yang dibangun sebagai kerangka atau pondasi pendidikan. Maka perlu juga dipahami, bahwa sejauh mana kebijakan politik pemerintah terhadap pendidikan. Politik pendidikan adalah penggunaan kekuasaan untuk memaksakan kebijakan pemerintah agar bisa dilaksanakan dalam kebijakan pendidikan. Kemudian kebijakan politik pendidikan dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan dan efektifitasnya. Evaluasi politik pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan mengkaji berbagai kinerja kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan politik pendidikan dan apa dampaknya terhadap suatu persoalan.

Implementasi politik pendidikan merupakan sebuah hasil dari penggunaan kekuasaan untuk mendesak kebijakan pendidikan yang dapat bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dapat dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk melakukan desakan terhadap pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang diberlakukan. Sebaliknya politik pendidikan lunak dalam menekankan implementasi kekuasaan secara halus (*subtly power*) lewat strategi. (Tesis).

Respon dunia pendidikan terhadap perkembangan zaman adalah dengan melakukan pergantian kurikulum. Ini yang menjadi salah satu faktor mengapa secara berkala kurikulum pendidikan diperbarui untuk dikembangkan dengan menonjolkan aspek substansi yang dipandang lebih baik dan berusaha melakukan terobosan dengan meminimalkan kekurangan atau kelemahan dari kurikulum sebelumnya. Jadi, upaya yang dilakukan untuk

memperbarui kurikulum sebagai langkah penyempurnaan kurikulum adalah dengan penerapan dan melaksanakan Kurikulum 2013. Kurikulum terbaru yang dipandang sebagai rumusan yang lebih tepat guna dan efisien demi mendidik peserta didik yang lebih baik lagi.

PEMBAHASAN

Artikel ini merupakan tinjauan pustaka dan gagasan konseptual tentang kajian politik pendidikan terhadap kebijakan kurikulum 2013, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil gagasan konseptual.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen yang erat hubungannya dan dinamis disetiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradapan manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Di dunia Islam, keterkaitan antara pendidikan dan politik dalam sejarah peradapan Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umaro dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya. Dalam analisisnya tentang pendidikan pada masa Islam klasik, (Muhammad Iqbal dan H. Amin Husein Nasution, 2010) menyimpulkan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang berkembang, yaitu dengan keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta didik, melainkan juga

dalam bidang administrasi, keuangan, dan kurikulum.

Di negara-negara Barat, kajian tentang hubungan pendidikan dan politik dimulai oleh plato dalam bukunya “Republik”. Plato mendemonstrasikan dalam bukunya tersebut bahwa dalam budaya Helenik, lembaga pendidikan adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik (Leo Agustino, 2006). Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan ditangan kelompok-kelompok elite yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dengan aktivitas politik.

Dalam ungkapan Albernethy dan Coombe (M. Sirozi, 2007), *Education and politics are inextricably linked* (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). Menurut mereka hubungan timbal-balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*employment*), peranan politik kaum cendekia (*the political role of the intelligentia*). Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan signifikan antara berbagai kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik dan ekonomi serta kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik, walaupun belum menjadi satu bidang

kajian akademik. Publikasi yang menggunakan tema pendidikan dan politik belum tampak kepermukaan. Kalaupun ada, fokus bahasanya belum begitu menyentuh aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Akan tetapi keyakinan akan adanya hubungan yang erat antara pendidikan dan politik tampaknya sudah mulai tumbuh.

Fungsi Politik Institusi Pendidikan

Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu. Eliot (M.Sirozi, 2007) menulis: “Walaupun kekuasaan politik terpusat pada berbagai kelompok dan individu, efektifitas dan kegunaannya dibentuk oleh berbagai institusi. Pola institusional pendidikan publik mungkin saya tampak kokoh, cukup mantap, sehingga untuk dapat berhasil, setiap proposal perlu menyesuaikan diri dengannya. Dan juga Eliot menambahkan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan, kurikulum, misalnya dapat menjadikan media sosialisasi politik”.

Fungsi politik pendidikan secara khusus juga dapat diaktualisasikan melalui proses pembelajaran. Menurut Massialas (M. Sirozi, 2007), proses pembelajaran bisa bersifat kognitif (misalnya, mendapatkan pengetahuan dasar tentang suatu sistem), bisa bersifat afektif (misalnya, mengetahui sikap-sikap positif dan negatif terhadap penguasa atau symbol-simbol), bisa bersifat evaluative (misalnya, penanaman rasa ingin berpartisipasi). Sebagian besar unsur-unsur pembelajaran tersebut dirancang dan

diarahkan sedemikian rupa untuk memenuhi tuntutan politik tertentu.

Institusi-institusi pendidikan, walaupun pada awalnya didesain untuk menjalankan fungsi-fungsi pendidikan semata, dalam perkembangannya bisa saja menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu, baik disadari maupun tidak disadari oleh para pengelolanya. Ada tiga alasan utama untuk hal ini: pertama, karena keberadaan dan perkembangan institusi pendidikan tidak terlepas dari dinamika sosial politik masyarakat lingkungannya. Kedua, karena kuatnya kecenderungan para politisi untuk mengeksploitasi peran institusi pendidikan untuk kepentingan politik mereka. Ketiga, karena para pengelola lembaga pendidikan pada dasarnya juga adalah para politisi yang senantiasa dihadapkan pada dinamika internal maupun eksternal. (Tesis).

Tujuan politik pendidikan

Tujuan politik pendidikan adalah untuk mengetahui dan menyamakan standarisasi kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat geografis yang berbeda-beda, maka standarisasi pendidikan nasional harus dilakukan, dalam rangka memberikan dorongan untuk menyamakan pendidikan diseluruh Indonesia.

Kontrol Negara Terhadap Pendidikan

Untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak negara yang menerapkan kontrol sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Banyak negara yang

menempuh segala cara untuk terus mengontrol berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang berkembang dalam masyarakat. Memperketat birokrasi, mendikte kurikulum, menerapkan sistem akreditasi dan membuat skema subsidi merupakan beberapa cara yang sering digunakan oleh suatu negara dalam upaya mengontrol aktivitas pendidikan masyarakat.

Menurut Dale (M. Sirozi, 2007), kontrol negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui empat cara, yaitu: pertama, sistem pendidikan diatur secara legal; kedua, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan obyektivitas; ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education); keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung dilembaga pendidikan dalam konteks politik tertentu.

Lebih lanjut Dale (M.Sirozi, 2007), mencatat setidaknya ada tiga problem pokok yang selalu ada dalam agenda sistem pendidikan, yaitu: 1) dukungan langsung terhadap proses akumulasi capital; 2) memberikan konteks sosial lebih luas yang tidak saling bertentangan dengan akumulasi capital yang berlangsung terus-menerus; 3) legitimasi kegiatan negara dalam sistem pendidikan.

Krisis yang dihadapi oleh negara secara langsung dan vital, mempengaruhi sistem pendidikan karena sistem pendidikan: 1) menyediakan tenaga kerja terlatih dan menghasilkan pengetahuan teknis untuk sistem ekonomi; 2) adalah mekanisme yang nyaman, yang dapat digunakan oleh negara untuk mendemonstrasikan kontrol rasional terhadap kejadian-kejadian ekonomi melalui perencanaan tenaga kerja dan rasio pengeluaran pribadi dan publik; 3) adalah

agenda penting sosialisasi dalam rangka melegitimasi tatanan ekonomi dan politik; 4) adalah krusial dalam pengembangan motivasi dan komitmen dikalangan generasi muda (Bate, M. Sirozi, 2007).

Dalam skala apapun, kontrol negara terhadap pendidikan membawa implikasi terhadap kinerja dan performa suatu sistem pendidikan. Analisis terhadap berbagai persoalan kenegaraan akan berimplikasi terhadap pendidikan. Ada tiga implikasi utama analisis tentang negara terhadap pendidikan. Pertama, sistem pendidikan tidak bisa diharapkan tetap kebal terhadap politisasi yang terus meningkat dalam berbagai wilayah kehidupan yang terjadi melalui intervensi negara yang lebih besar. Tempat kedudukan dan rentang kontrol terhadap pendidikan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada negara. Kedua, sistem pendidikan dapat mencegah timbulnya masalah dengan menyajikan nilai. Pendidikan dapat terus memenuhi janji-janji yang secara implicit maupun eksplisit diberikannya kepada publik dan untuk melayani harapan-harapan yang diberikannya. Ketiga, sistem pendidikan diharapkan memberi kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan legitimasi, politik dan ekonomi negara, dan juga pada setiap jenjang pendidikan, sebagaimana juga didalam negara secara keseluruhan, tidak akan ada solusi terus-menerus bagi problematika tersebut. (Tesis).

Berbagai tindakan negara, khususnya dalam bidang peraturan perundang-undangan, sangat signifikan terhadap pendidikan dan memiliki dampak krusial terhadap perkembangan pendidikan. Berbagai tuntutan perubahan terhadap dunia pendidikan tidak akan banyak artinya jika tidak menyentuh berbagai peraturan perundang-undangan yang

mengatur substansi dari tuntutan-tuntutan tersebut.

Sketsa Politik Pendidikan di Era Otonomi

Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi enam periode perkembangan, menurut Jalal dan Musthofa (M. Sirozi, 2007); yaitu: periode pertama, adalah periode awal atau prasejarah yang berlangsung hingga pertengahan tahun 1800-an. Periode ini pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai-nilai agama dan pengembangan keterampilan hidup (life skill), yang dikontrol langsung oleh para tokoh agama. Mereka memiliki otoritas penuh untuk menentukan apa yang dipelajari, siapa yang mengajar, bagaimana dan dimana diberlakukan pembelajaran, dan siapa saja yang berhak atau tidak berhak atas program pendidikan tertentu. Periode kedua, masa colonial Belanda dari tahun 1800-an sampai tahun 1945. Terjadi proses modernisasi dan pengumpulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan kolonial Belanda dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Pemerintah kolonial belanda berusaha menempuh segala cara untuk memastikan berbagai kegiatan pendidikan tidak bertentangan dengan kolonialisme (sekularisasi). Pada pihak aktivis gerakan kemerdekaan, (kalangan keagamaan dan sekuler), berusaha sekuat tenaga mendesain dan mengembangkan kegiatan pendidikan yang dapat membuka mata hati dan pikiran kaum pribumi terhadap bentuk penindasan, diskriminasi pemerintah colonial. Periode ketiga, masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada periode ini gerakan kemerdekaan sudah menyebar keseluruh pelosok negeri dan telah menjadi kekuatan politik yang cukup kuat untuk menentukan arah perkembangan berbagai aspek

kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Periode keempat, periode orde lama berlangsung dari tahun 1945 sampai tahun 1966. Kegiatan pendidikan mengarah pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah *nation and character building* dan kendali utama penyenggara pendidikan nasional dipegang oleh tokoh-tokoh nasionalis. Periode kelima, yaitu periode orde baru yang berlangsung dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrumen pelaksanaan program pembangunan diberbagai bidang, khususnya pedagogic, kurikulum, organisasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Periode keenam, periode reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode ini semangat reformasi menjalar kesemua sektor pembangunan, termasuk sektor pendidikan, sehingga menjadi menu utama penataan sistem pendidikan nasional.

Kebijakan otonomi daerah membuka peluang bagi berkembangnya proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang dinamis dan demokratis, sehingga membuka ruang politik yang lebar bagi berbagai kelompok kepentingan untuk merepresentasikan nilai-nilai dan atau kepentingan-kepentingan pendidikan mereka dalam berbagai kebijakan pendidikan, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Ruang politik yang lebar membuat proses kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah menjadi sangat dinamis dan rawan konflik, baik secara horizontal maupun vertikal.

Politik Desentralisasi Pendidikan

Menurut Jalal dan Musthofa (M.Sirozi, 2007), ada dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait dalam desentralisasi pendidikan. Konsep pertama, berkenaan dengan isu umum desentralisasi, yaitu transfer otoritas kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. Dalam konsep ini, pemerintah harus mendelegasikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah beserta dana yang dibutuhkan untuk membiayai tanggung jawab yang dibebankan. Konsep kedua, berkenaan dengan pergeseran keputusan pendidikan dari pemerintah ke masyarakat. Ide dasar dibalik konsep ini, bahwa masyarakat harus lebih tahu dan memutuskan sendiri program pendidikan yang dikehendaki karena masyarakatlah yang akan memanfaatkannya. Dengan dua konsep tersebut, maka jelaslah bahwa tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkn mutu pendidikan.

Hakekat Kurikulum 2013

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 19). Kurikulum 2013 merupakan salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum baru ini secara serentak telah dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia pada tahun pelajaran 2014/2015. Oleh karenanya, mau tidak mau setiap pendidik satuan pendidikan, maupun pihak-pihak yang berkecimpung

di dunia pendidikan wajib mengenal dan memahami seluk beluk Kurikulum 2013 tersebut. Walaupun masih banyak pro dan kontra mengenai penerapan kurikulum ini, namun yang pasti Kurikulum 2013 wajib dilaksanakan dan perlu didukung oleh semua pihak, agar pendidikan di negeri ini semakin maju dan meningkat kualitasnya sehingga mampu bersaing ditengah-tengah persaingan global.

Kurikulum 2013 dikembangkan dalam rangka menyiapkan peserta didik memiliki kemampuan soft skills dan hard skills yang seimbang dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sehingga mampu beradaptasi di mana pun dan kapanpun berada. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, pasal 36, ayat 1,2, dan 3).

Kedua kemampuan tersebut, soft skills dan hard skills ditanamkan kepada peserta didik melalui berbagai macam kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada kompetensi sikap (attitude), kompetensi pengetahuan (knowledge), dan kompetensi ketrampilan (skills). Dengan memiliki provision tersebut, diharapkan dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang, serta mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia yang berkemajuan. Dengan demikian, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan terpenuhi dan jauh dari segala kebodohan, terutama jauh dari intrik-intrik politik yang tidak menguntungkan bangsa ini. Semua dapat terwujud ketika politik

pendidikan mampu untuk dijalankan sesuai amanah undang-undang sebagai perwujudan keinginan rakyat Indonesia.

Selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil dan tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum mustahil pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai efisien sesuai yang diharapkan. Kurikulum sangat penting peranannya dalam satuan pendidikan. Sebab, kurikulum salah satu penentu keberhasilan pendidikan yang dimaknai sebagai serangkaian upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

Pendapat pakar pendidikan Saylor, Alexander dan Lewis (M. Fadillah, 2014), Kurikulum adalah segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah. Pendapat pakar lain, mengatakan bahwa kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah, Harorld B. alberty (M. Fadillah, 2014).

Kurikulum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk peserta didik di sekolah dan dimaknai sebagai serangkaian pengalaman belajar peserta didik. Selain itu kurikulum juga dimaknai sebagai suatu program atau perencanaan pembelajaran yang memuat

berbagai petunjuk belajar serta hasil yang diharapkan.

Kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menajamkan nilai-nilai sikap dengan ketrampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan dilembaga pendidikan. Kurikulum 2013 digagas dalam rangka untuk mengimplementasikan nilai-nilai attitude, skills, dan knowledge yang meningkat dan berkembang pada peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Sehingga akan dapat berpengaruh dan menentukan kesuksesan dalam kehidupan mendatang.

Kebijakan pemerintah dalam politik pendidikan dilakukan semata-mata perlu pengembangan Kurikulum dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan bangsa Indonesia. Dimana pengaruh global semakin luas, sehingga peran pendidikan harus lebih mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berakhlak dan berkemajuan serta mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dunia. Berhasil tidaknya suatu bangsa sebagai salah satu barometernya adalah pendidikan mampu menciptakan output sumber daya manusia berkemajuan, mampu bersaing dan berdaya guna dalam segala bidang.

Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah terhadap pembaruan atau pengembangan Kurikulum 2013 didasarkan pada pertimbangan menurut Oemar Hamalik, 2010, (M.Fadillah, 2014): 1) Kebijakan nasional dalam rangka pembangunan nasional sebagai upaya merealisasikan butir-butir ketetapan dalam GBHN, khususnya yang berkenaan dengan sistem pendidikan nasional; 2) Kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa kurikulum menempati kedudukan

sentral; 3) Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan dan memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menciptakan IPTEK; 4) Kebutuhan, tuntutan, aspirasi, dan masalah dalam sistem masyarakat bersifat dinamis, dan berubah dengan cepat dewasa ini dan masa datang; 5) Profesionalisasi dan fungsionalisasi ketenagaan bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkualitas dan mampu bekerja sama dengan unsur-unsur ketenagaan profesi lainnya; 6) Upaya pembinaan disiplin ilmu pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin ilmu lainnya serta pembinaan ilmu pendidikan khususnya.

Pengembangan Kurikulum 2013 sebagai modal utama dalam persaingan global yang semakin kompleks. Dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang sebagai kunci utama dalam menghadapi perkembangan zaman untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkemajuan dan mumpuni dalam kecakapan disiplin ilmu pengetahuan. Kurikulum merupakan perangkat yang sangat berperan dalam kemajuan bangsa ini, melalui penentuan arah pendidikan kita.

Pemerintah dalam konteks ini memberikan pertimbangan spesifik, mengenai begitu pentingnya ilmu pengetahuan untuk menopang perkembangan dalam persaingan global, diantaranya adalah: 1) Abad 21 adalah abad pengetahuan yang berkemajuan dalam segala bidang untuk menentukan tingkat perkembangan kemajuan dan keberhasilan suatu negara; 2) Nilai elemen pengetahuan jauh lebih mahal dari nilai

elemen fisik pada setiap produk yang dihasilkan, seperti perusahaan-perusahaan yang senantiasa memajukan pengetahuan teknologinya baik dalam bidang kesehatan, software, dan lainnya; 3) Dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu berinovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang ramah dan selaras dengan cita-cita bangsa untuk lebih maju, dan mempunyai nilai tambah bagi bangsa Indonesia di mata dunia; 4) Modal pembangunan bisa diperoleh dari salah satu elemen pengetahuan yaitu peran pendidikan.

Dari keempat pertimbangan inilah memberikan gambaran begitu pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, setiap orang wajib hukumnya untuk senantiasa dibekali ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan serta inovatif yang bisa menciptakan nilai lebih untuk bangsa ini dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Hal ini akan terwujud, apabila pendidikan bisa berperan secara maksimal untuk menciptakan dan mengembangkan pengetahuan. Tentunya, peran politik pendidikan yang dijalankan institusi pemerintah sangat besar pengaruhnya agar terwujud pendidikan berkemajuan yang menghasilkan output pendidikan terbaik.

Pengembangan Kurikulum 2013, di Indonesia memiliki demografi yang luar biasa besarnya sebagai modal pembangunan. Demografi Indonesia yang telah menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif, sehingga tidak menjadikan beban bagi pembangunan akan tetapi lebih memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang profesional dan penuh

potensi, maka dapat menciptakan berbagai peluang dalam bidang-bidang penunjang pembangunan yang menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkemajuan dan berkualitas, maka diperlukan pula pendidikan yang berkualitas. Hal itu bisa kita lihat, tidak hanya sebatas kemampuan kognitif saja, akan tetapi kemampuan afektif dan psikomotorik harus seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan pola pendidikan yang tepat sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan global terutama terkait tenaga kerja yang profesional. Pendidikan dimaksud merupakan variabel penentu, berhasil tidaknya transformasi pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan bisa menghasilkan menjadi modal dasar pembangunan. Sehingga kekhawatiran terhadap sumber daya manusia yang menjadi beban pembangunan tidak lagi menjadi topik dalam setiap program pembangunan bangsa yang berkemajuan di era global ini.

Pengembangan Kurikulum 2013 adalah salah satu politik pendidikan yang diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah untuk menghasilkan manusia-manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif, baik sebagai tenaga kerja yang produktif dalam pemerintahan, perusahaan/wirausaha yang inovatif. Dengan kata lain, Kurikulum 2013 yang dirancang untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, mandiri, kreatif dan penuh inovasi.

Untuk mewujudkan rancangan tersebut, maka Kurikulum 2013 telah dijabarkan secara jelas dalam bentuk kompetensi pembelajaran yang dirumuskan pada setiap mata pelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, pasal 1, ayat 20).

Mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan (dipelajari) dalam setiap lembaga pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK). Mata pelajaran perlu dibingkai oleh kompetensi pembelajaran dan inovasi karena belajar tidak hanya di sekolah, akan tetapi bisa bersumber dari kehidupan masyarakat. Kurikulum 2013 yang mengedepankan inovasi keunggulan lokal akan merupakan cermin dari sumber potensi lokal yang bisa membuat pendorong sekaligus mampu mengangkat potensi lokal menjadi suatu unggulan-unggulan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kompetensi inovasi memerlukan dukungan proses pembelajaran yang dapat memperbuat kreatifitas dengan mengedepankan kemampuan berpikir kritis dalam setiap pemecahan persoalan. Sedangkan dukungan untuk mencapai pembangunan tersebut diperlukan kompetensi pemanfaatan informasi, media, dan TIK. Pengembangan pemikiran inilah, maka kurikulum sangat perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Setiap ilmuwan sepakat, bahwa pendidikan merupakan sarana yang tepat dan berjenjang untuk menumbuhkan kreativitas pada setiap peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa supaya dapat menghasilkan output pendidikan yang berkualitas dan berkemajuan. Pendidikan berkemajuan adalah pendidikan yang senantiasa memberikan alternatif terbaik bagi semua persoalan

yang terjadi masa kini dan masa yang akan datang. Guna mewujudkan hal itu, sangat diperlukan kurikulum yang mengedepankan kompetensi personal melalui proses observasi, interview, analyzing, dan mencoba, sehingga diperoleh peserta didik yang terlatih dalam proses observasi, interview, analyzing, dalam memecahkan persoalan. Dengan alur perumusan kurikulum yang demikian akan kita dapatkan pembentukan kreativitas peserta didik.

Politik pendidikan pemerintah melalui kebijakan Kurikulum 2013 telah merumuskan cakupan standar penilaian yang memiliki pertanyaan dengan jawaban tidak hanya satu, menilai proses pengerjaannya bukan hanya sekedar hasilnya, penilaian ekspresif, dan masih banyak lagi cakupan yang terkandung dalam rumusan kurikulum tersebut. Dengan pengembangan seperti inilah, maka akan didapatkan peserta didik yang lebih aktif dan kreatif dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disajikan, sehingga proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung menarik, menyenangkan serta diperoleh output yang maksimal.

Kurikulum 2013 telah dirumuskan dengan mengedepankan observasi, interview, analyzing, menyimpulkan dan memutuskan untuk mendapatkan peserta didik yang semenjak kecil telah terlatih untuk mengambil keputusan terbaik bagi masa depannya. Hasil kajian neurologi menunjukkan bahwa pada saat lahir otak bayi membawa potensi 100 milyar yang pada proses berikutnya sel-sel dalam otak akan berkembang dengan begitu pesat menghasilkan bertrilyun-trilyun sambungan antar-neuron. Apabila anak jarang mendapatkan rangsangan pendidikan, maka perkembangan otaknya lebih kecil 20-30%

dari ukuran normal anak seusianya, menurut Wahyudin pada Tahun 2011, (M. Fadillah, 2014). Pendapat lain juga menyebutkan bahwa sekitar 50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi ketika umur 4 tahun, 80% mengatakan akan terjadi pada umur 8 tahun, dan mencapai titik maksimal ketika anak umur sekitar 18 tahun.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan terobosan dalam sistem pembelajaran yang dapat membangun kemampuan high order thinking skill melalui proses mencari tahu, bukan diberi tahu. Karena itu, kurikulum perlu dikembangkan untuk dapat memberikan solusi kebutuhan peserta didik yang mampu berpikir kreatif, mandiri, dan inovatif. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diupayakan untuk menjawab persoalan-persoalan kebutuhan yang mampu memberikan hasil positif pendidikan berkemajuan bagi bangsa Indonesia.

Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013

Fungsi kurikulum 2013 secara spesifik mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013

Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum

2013 adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi Kurikulum 2013, sebagai berikut: 1) Peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia, menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh yang dijabarkan dalam mata pelajaran; 2) Kebutuhan kompetensi masa depan. Penjelasan adalah kemampuan peserta didik yang diperlukan, antara lain dalam kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan unsur nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini, sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam proses pembelajaran; 3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pendidikan proses sistemik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotorik) berkembang secara optimal. Sejalan itu kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik; 4) Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan pengalaman hidup sehari-hari.

Karena itu kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan kelulusan yang relevan dengan kebutuhan

pengembangan daerah; 5) Pembangunan daerah dan nasional. Kurikulum adalah salah satu pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional; 6) Tuntutan dunia kerja. Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa enterpreneur (kewirausahaan) dan mempunyai life skills. Maka kurikulum perlu memuat kecakapan hidup (*life skills*) untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang telah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi; 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan; 8) Agama. Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, takwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama; 9) Dinamika perkembangan global. Kurikulum menciptakan kemandirian, baik individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas; 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; 11) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial

budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya; 12) Kesenjangan gender salah satu topik yang diperhatikan dalam pengembangan kurikulum; 13) Karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan, (M.Fadillah, 2014).

Landasan Pengembangan Kurikulum 2013

Dalam penyusunan kurikulum 2013 dilandasi beberapa aspek kebijakan pemerintah, yaitu: 1) Aspek filosofis, yaitu kerangka berpikir dan hakekat pendidikan yang sesungguhnya, baik pendidikan yang berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat, serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi; 2) Aspek yuridis adalah suatu landasan yang digunakan sebagai payung hukum dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.

Adapun landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 ini adalah: a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas; b) RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan yang berisi tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum; c) Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; penyempurnaan kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing karakter bangsa; d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; e) Permendikbud Nomor 18A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013.

Aspek yang ketiga adalah aspek konseptual, yang merupakan landasan yang didasarkan pada ide atau gagasan yang diabstraksikan dari peristiwa konkrit, yang meliputi; a) prinsip relevansi; b) model kurikulum berbasis kompetensi; c) lebih dari sekedar dokumen; d) proses pembelajaran, yang meliputi aktivitas belajar, output belajar, dan outcome belajar; e) penilaian sesuai dengan teknik penilaian dalam kompetensi dan perjenjangan penilaian.

Elemen Perubahan Kurikulum 2013

Implementasi politik pendidikan dalam kurikulum 2013 dimaksudkan untuk melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirilis pada tahun 2004 dengan bidang cakupan kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara terpadu. Artinya, bahwa soft skills dan hard skills berjalan secara seimbang dan integratif.

Perubahan dalam kurikulum 2013, bisa dilihat mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah atas, dengan elemen-elemen perubahan sebagai berikut: 1) Kompetensi lulusan: baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK ditekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan; 2) Kedudukan mata pelajaran: yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi; 3) Pendekatan isi: pendekatan kompetensi sekolah dasar dikembangkan melalui tematik integrative dalam semua mata pelajaran, sedangkan SMP dan SMA dikembangkan melalui pendekatan mata pelajaran, dan SMK dikembangkan

melalui pendekatan vokasional (keahlian); 4) Struktur kurikulum.

Struktur kurikulum meliputi; a) untuk struktur kurikulum SD, yaitu terdiri dari holistik berbasis sains (alam, sosial, dan budaya); dengan jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6; dan jumlah jam bertambah 4 jam pelajaran dalam per minggu. b) tingkat SMP struktur kurikulumnya meliputi: TIK menjadi media dalam semua mata pelajaran yang terintegrasi pengembangannya dalam mata pelajaran dan ekstrakurikuler; dengan jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10; dan jumlah jam bertambah menjadi 6 jam pelajaran dalam per minggu; c) tingkat SMA struktur kurikulumnya mengalami perubahan sistem, yang terbagi dalam mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan; selain itu juga terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa dan jumlah jam bertambah menjadi 1 jam pelajaran per minggu, akibat perubahan pendekatan pembelajaran; d) untuk SMK.

Struktur kurikulum SMK meliputi penambahan jenis keahlian (vokasional) yang berdasarkan kebutuhan, yaitu: 6 program keahlian, 40 bidang keahlian, 121 kompetensi keahlian. Kemudian terjadi pengurangan pada kelompok mata pelajaran adaptif dan normatif, serta penambahan produkti yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia industri. 5) Proses pembelajaran; untuk semua jenjang pendidikan standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi disempurnakan dengan penambahan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Adapun ruang belajar dapat dilaksanakan di kelas, di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan paradigma baru, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar.

Dalam penerapan pembelajaran sikap tidak sekedar diajarkan secara verbal, akan tetapi diaplikasikan dalam bentuk contoh dan keteladanan. Seorang pendidik tidak hanya sebagai fasilitator, akan tetapi harus memberikan keteladanan pada peserta didiknya dalam kehidupan sehari-hari (baik dalam lingkungan sekolah dan masyarakat); 6) Penilaian hasil.

Penilaian hasil merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar yang dilakukan peserta didik. Untuk Kurikulum 2013, kriteria penilaian hasil belajarnya adalah: a) penilaian berbasis kompetensi; b) pergeseran penilaian dari test, menuju penilaian otentik (mengukur semua kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang didasarkan pada proses dan hasil); c) memperkuat Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan pencapaian hasil belajar yang didasarkan pada posisi skor ideal (maksimal); d) penilaian dilakukan menyeluruh pada level kompetensi dasar, kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan; e) diupayakan memaksimalkan pemanfaatan portofolio yang dibuat oleh siswa sebagai instrumen utama dalam penilaian. 7) Ekstrakurikuler adalah bentuk kegiatan di luar program yang tertulis dalam kurikulum (diluar jam pembelajaran sekolah).

Dalam Kurikulum 2013, kegiatan ekstrakurikuler dikelompokkan menjadi: a) tingkat SD: Pramuka (wajib), UKS, PMR, dan Bahasa Inggris; b) tingkat SMP: Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain; c). tingkat SMA/SMK: Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan. Tujuan penerapan kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan bakat, minat,

intelektual, keimanan, wawasan kebangsaan dan ketrampilan, dengan cara: 1) mengadakan pendampingan untuk siswa berprestasi; 2) mengikuti lomba mata pelajaran (mapel) dan siswa teladan tiap ada perlombaan; 3) mengadakan kegiatan yang memacu kreativitas anak serta mengembangkan bakat, minat, dan menggali kompetensi anak; 4) mengikuti lomba kepramukaan sesuai dengan jenjang satuan pendidikan; 5) mengadakan pembinaan kepribadian dan religiositas siswa melalui kegiatan; 6) menggerakkan siswa dalam pengadaan mading; 7) menyelenggarakan kegiatan kemah (persami) pramuka bagi siswa; 8) dan menyelenggarakan ekstrakurikuler lainnya.

SIMPULAN

Politik pendidikan adalah sikap yang konsisten dalam hal mengarahkan kontrol sosial, baik mengetahui tujuan maupun metodenya terhadap sistem pendidikan. Yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Dengan demikian kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada ilmu politik normatif yang dalam masyarakat

Indonesia berarti kewajiban pendidikan berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan teori dan kenyataan di lapangan agar dapat menjadi masukan untuk kebijakan pendidikan berikutnya.

Tujuan politik pendidikan adalah untuk mengetahui dan menyamakan standarisasi kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat geografis yang berbeda-beda, maka standarisasi pendidikan nasional harus dilakukan, dalam rangka memberikan dorongan untuk menyamakan pendidikan di seluruh Indonesia.

Guna mewujudkan hal itu, sangat diperlukan kurikulum yang mengedepankan kompetensi personal melalui proses observasi, interview, analyzing, dan mencoba, sehingga diperoleh peserta didik yang terlatih dalam proses observasi, interview, analyzing, dalam memecahkan persoalan. Dengan alur perumusan kurikulum yang demikian akan kita dapatkan pembentukan kreativitas peserta didik.

Kebijakan Kurikulum 2013 telah merumuskan cakupan standart penilaian yang memiliki pertanyaan dengan jawaban tidak hanya satu, menilai proses pengerjaannya bukan hanya sekedar hasilnya, penilaian ekspresif, dan masih banyak lagi cakupan yang terkandung dalam rumusan kurikulum tersebut. Tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirilis pada tahun 2004 dengan bidang cakupan kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara terpadu. Artinya, bahwa soft skills dan hard skills berjalan secara seimbang dan integratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cham, M. Sam & Emzir. 2010. *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia
- Hamzah B. Uno. 2009. *Model Pembelajaran; Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Edisi lengkap 2009: Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No.199 Tahun 2005, *tentang Standar Nasional Pendidikan*; Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008, *tentang Wajib Belajar*.
- Jumani. 2011. *Implementasi Politik Pendidikan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek*. Tesis Pascasarjana UMM
- Leo Agustinus. 2006 *Politik dan Kebijakan Sosial Politik*, Alfabeta,
- M. Fadillah. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MA*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

- M. Sirozi. 2007. *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Iqbal & H. Amin Husien Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Prenada Media Group
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 *tentang Standar Kompetensi Lulusan*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 *tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 *tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 *tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 *tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 *tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 *tentang Implementasi Kurikulum*.
- Rusman. 2011. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, Rhineka Cipta
- Suyono dan Hariyanto. 2011. *Belajar dan Pembelajaran; Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thobroni & Arif Mustofa. 2011. *Belajar dan Pembelajaran; Pengembangan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.